

Peran Penyedia Barang Langsung Dan Jasa oleh Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo
The Role of Direct Goods and Service Providers by the Food and Agriculture Office in Increasing Rice Production in Sidoarjo Regency

Rafdiah Iftisyah Rahmadani^{1*}, Lailul Mursyidah², Yusuf Hariyoko³

E-mail: rafdiahiftisyah0709@gmail.com^{1*}, lailulmursyidah@umsida.ac.id², yusufhari@untag-sby.ac.id³

^{1,2}Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*corresponding author

Dikirimkan: 6-6-2022; Diterima: 25-9-2022; Diterbitkan: 27-9-2022

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.6636>

Abstract

Etymologically, the role means someone who performs an action where the action is expected by other people. This means that every action that each individual has has an important meaning for some people. The agency has several programs to increase rice production, starting from carrying out activities to control OPT (Plant Destruction Organisms), providing pesticide assistance, coordinating with related parties for irrigation arrangements and optimizing the use of water pumps. However, in carrying out its role, the Food and Agriculture Service has several obstacles encountered in the field, including the Service has not been able to ensure the availability of fertilizers, limitations in human resources and budgets that have caused rice production in Sidoarjo Regency to decline. This study used descriptive qualitative methods. The data were obtained through observation, documentation, and interviews with the Head of Facilities and Infrastructure, the Head of Planning, and a combination of farmer groups. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the government's role as a direct provision of goods and services cannot be carried out optimally by the Food and Agriculture Service, especially in providing fertilizer according to the request of the farmers because the subsidized fertilizer stock provided by the Service is still incomplete. In addition, the Department of Food and Agriculture has not been able to provide a complete machine tool for farmer groups in Sidoarjo Regency.

Keywords: *The Role of the Government, Allocation, fertilizers and machiner, Farmers Group Association*

Abstrak

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Dinas memiliki beberapa program untuk meningkatkan produksi padi mulai dari melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), memberi bantuan pestisida, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk pengaturan irigasi serta mengoptimalkan pemanfaatan pompa air. Tetapi dalam melaksanakan perannya Dinas Pangan dan Pertanian memiliki beberapa kendala yang ditemui di lapangan diantaranya Dinas belum bisa memastikan ketersediaan pupuk, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran yang menyebabkan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo menurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kasi Sarana dan Prasarana, Kabid Perencanaan, dan gabungan kelompok tani. Teknik Penganalisaan data dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai direct provision of goods and

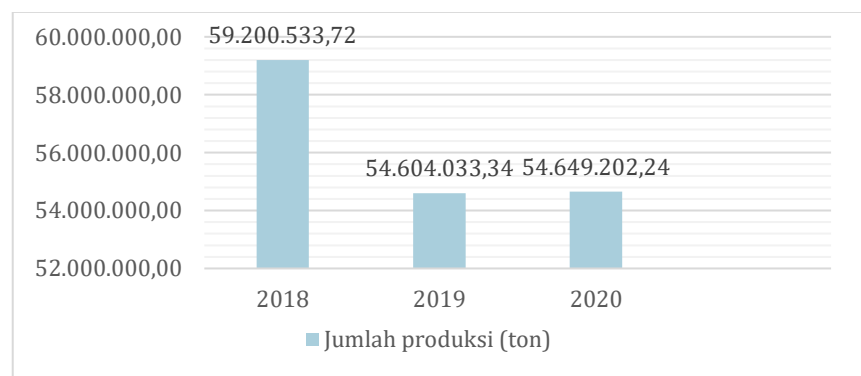
services belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Pangan dan Pertanian, terutama dalam memberikan pupuk sesuai dengan pengajuan para petani karena stok pupuk subsidi yang disediakan oleh Dinas masih belum lengkap. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui yaitu kurangnya anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan belum bisa menyediakan alsintan yang lengkap untuk gabungan kelompok tani di Kabupaten Sidoarjo.

Keywords: Peran Pemerintah, Alokasi, pupuk dan alsintan, Gabungan Kelompok Tani

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam mendukung perekonomian dan berimplikasi penting bagi pembangunan ekonomi di masa depan. Sektor pertanian sendiri terbagi menjadi beberapa subsektor dalam hal penerapannya. Di Indonesia, sektor pertanian dibagi menjadi lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan kedua, subsektor hortikultura ketiga, subsektor peternakan keempat, dan subsektor perikanan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan penyuluhan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan petani dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian.

Dengan bertambahnya luas areal padi, kontribusi sektor pertanian masih senantiasa jadi salah satu penopang yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia dalam proses pemenuhan pasokan pangan yang terus bertambah. Sedangkan pada tahun 2018 produksi padi di Indonesia memiliki produksi yang sangat besar, yang dapat kita lihat pada gambar 1. sebagai berikut.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Produksi Padi di Indonesia (Sumber : Data Kementerian Pertanian Indonesia, 2021)

Menurut gambar 1. mengenai grafik di atas bahwa puncak produksi beras Indonesia selama tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 produksi beras di Indonesia mengalami peningkatan. Sedangkan produksi beras tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 4.596.500,38 ton. Pada tahun 2019 hingga 2020 peningkatan produksi padi di Indonesia tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 45.168,9 ton.

Sidoarjo adalah sebuah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Secara geografis berbatasan dengan kota Surabaya, Gresik, Selat Madura, Pasuruan dan Mojokerto. Sidoarjo memiliki 18 kecamatan yang mendukung pengolahan hasil industri dan perikanan yaitu Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Sedati, Krian, Sedati, Balongbendo, Taman, Tarik, Tanggulangin, Buduran, Gedangan, Waru dan Sidoarjo. Pada saat ini Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai kabupaten dengan zona industri, perikanan, serta pertanian.

Selama ini, Dinas Pangan dan Pertanian sudah memberikan program-program untuk meningkatkan produksi padi seperti melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) sehingga serangan tidak menyebar, memberi bantuan pestisida namun bantuan tersebut bersifat stimulan sesuai dengan rekomendasi dari POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk pengaturan irigasi serta mengoptimalkan pemanfaatan pompa air terutama yang berasal dari bantuan pemerintah yang ada di poktan maupun gapoktan, memberikan bantuan alsintan yang disesuaikan dengan spesifikasi lahan dan potensi wilayah. Untuk capaian program yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Analisis Pencapaian Program Tahunan Dalam Meningkatkan Produksi Padi

No	Program Kegiatan	Capaian	Kategori
1	Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)	98,30%	Berhasil
2	Pemberian Bantuan Pestisida	100,50%	Sangat Berhasil
3	Pemberdayaan Petani Pemakai Pompa Air	100,00%	Berhasil
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tepat Guna	100,00%	Berhasil

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2021

Data diatas menunjukkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian sudah melaksanakan keempat program dan pergram tersebut berjalan dengan baik. Di sisi lain Dinas juga memberikan ilmu pertanian dan membantu para petani yang kesulitan dalam melaksanakan program tersebut. Adapun yang menjadi kendala dalam meningkatkan produksi padi di Sidoarjo yang disebabkan oleh tidak memilikinya SDM yang paham akan teknologi, pemasaran produk yang terbatas, dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru. Disinilah salah satu peran Pemerintah yaitu Dinas Pangan dan Pertanian dalam melakukan peningkatan produksi padi di Sidoarjo.

Salah satu peran yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo adalah peran penyedia langsung barang dan jasa. Selama ini peran yang dilakukan oleh Dinas

Pangan dan pertanian yaitu, menyediakan alsintan untuk para petani yang dimana pemberian alsintan tersebut diberikan kepada para petani dengan beberapa kriteria, mengadakan pelatihan petani dengan mendatangkan narasumber untuk melatih petani dalam mengoperasionalkan alsintan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan teknik penentuan informan dengan *purposive sampling*, artinya jenis pengumpulan sampel probabilitas yang mana setiap orang di semua populasi target mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memilih (Sugiyono, 2013). Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan wawancara, observasi, fokus diskusi grup dan dokumentasi untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian.

Penggalian informasi terkait dengan pokok permasalahan peneliti menggunakan informan dan orang-orang yang dapat memberi informasi dan dianggap bisa memahami serta membantu dalam penelitian ini. Sasaran informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, sebagai key informan di mana peneliti terfokus untuk memperoleh data terkait peran yang akan dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk informan pendukung peneliti melakukan wawancara kepada para petani, dan kepala bidang yang menangani masalah produksi padi, dan kepala bidang sarana prasarana untuk peningkatan produksi padi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perencanaan bantuan alat pertanian

Jones dalam Mahsun (2009:8-9) terdapat tiga peran utama sektor publik dalam masyarakat yaitu, *Regulatory Role* yang dimana sektor publik memiliki peran untuk mengatur semua aturan untuk kepentingan publik. Kedua, *Enabling Role* merupakan peran sektor publik untuk memastikan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, *Direct Provision of Goods and Services*, organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, *public good* dan *quasi public goods* (Mahsun, 2009). Dalam hal ini organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Dalam sektor pertanian, pemerintah sendiri punya peran untuk menjaga pasokan, distribusi, dan koordinasi produksi pupuk pertanian (Zulaiha et al., 2018).

Dalam melaksanakan perannya sebagai *Direct Provision of Goods and Services* Dinas Pangan dan Pertanian sudah melaksanakan perannya melalui program Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sedangkan untuk pengajuan pupuk Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mempunyai aplikasi bernama e-RDKK. E-RDKK merupakan sebuah aplikasi untuk mengentri data kebutuhan pupuk petani berdasarkan *by name and by dress* yang ada di KTP petani. Kemudian dari penyuluh tersebut akan diserahkan kepada admin penyuluh untuk mengentri ke dalam aplikasi e-RDKK. Setelah itu, pengajuan tersebut akan di verifikasi oleh korluh (Koordinator Penyuluh). Setelah pengajuan tersebut sudah di acc oleh Kasi Perencanaan kemudian Kasi Perencanaan akan melanjutkan kepada Kepala Bidang. Apabila Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian menerima pengajuan tersebut maka Kabid tersebut akan meneruskan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pangan dan Pertanian juga melakukan kerjasama dengan beberapa kios dan distributor untuk menyediakan pupuk non subsidi untuk para petani dengan cara seperti itu Dinas mengharapakan stok pupuk subsidi yang menipis bisa diatasi dengan membeli pupuk non subsidi di kios atau distributor yang sudah kerja sama dengan Dinas. Untuk rekap e-RDKK Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut.

Tabel 2. Rekap e-RDKK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Jenis Pupuk				
			Urea (ton)	ZA (ton)	SP36 (ton)	NPK (ton)	Org (ton)
1	Sidoarjo	1.130,95	106.315	106.315	-	300.888	-
2	Buduran	1.687,36	258.512	179.966	11.235	443.236	-
3	Candi	2.843,07	499.028	362.830	2.690	768.897	-
4	Porong	2.166,36	366.983	253.912	7.905	515.014	2.050
5	Kremlung	2.984,70	538.550	360.036	-	693.689	-
6	Tulangan	2.529,20	581.407	300.363	-	496.269	-
7	Tanggulangin	3.442,97	494.356	322.970	22.777	888.406	-
8	Jabon	4.661,07	733.157	616.367	58.952	1.164.571	156.730
9	Krian	2.668,26	399.702	266.781	-	732.240	-
10	Balongsendo	4.442,81	669.182	447.817	907	1.241.800	6.210
11	Wonoayu	3.397,09	483.289	304.290	22.997	889.999	12.505
12	Tarik	5.659,8	726.227	470.984	-	1.277.576	-
13	Prambon	3.803,37	542.941	330.525	-	910.477	-
14	Taman	1.568,26	155.392	151.324	2.700	411.642	-
15	Waru	165,00	16.500	16.500	-	45.255	-

No	Nama Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Jenis Pupuk				
			Urea (ton)	ZA (ton)	SP36 (ton)	NPK (ton)	Org (ton)
16	Gedangan	1.576,88	161.930	159.361	2.464	424.336	-
17	Sedati	1.831,89	184.449	183.889	-	502.884	-
18	Sukodono	3.007,97	321.429	321.429	-	817.247	137.900
JUMLAH		49.566,87	7.239.349	5.155.659	132.809	12.524.423	315.395

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2021

Tabel 2. menjelaskan tentang rekapan yang diperoleh dari aplikasi e-RDKK. Rekapan tersebut menunjukkan bahwa permintaan pupuk yang sudah terpenuhi hanya tiga jenis dari 5 jenis pupuk yang disediakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Terutama pengajuan permintaan pupuk SP36 dan pupuk organik masih belum sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh para petani di Kabupaten Sidoarjo. Perencanaan kebutuhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan yang disediakan oleh petani melalui Gapoktan dan diusulkan ke desa.

Perencanaan yang sudah dilakukan dan diajukan, tidak dipastikan akan disetujui. Proses perencanaan yang tidak didukung dengan data yang memadai akan menyebabkan pemerintah tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat (Nahum, 2016). Keselarasan antara realisasi dan proses perencanaan juga mempertimbangkan kepemilikan sumberdaya dan akses yang dimiliki. Usaha untuk menciptakan perencanaan yang memadai harus terus diperbaharui menimbang kebutuhan pertanian pada pupuk yang konstan dan pasti akan terjadi pada setiap musim tanam (Pradnyana et al., 2017). Dorongan inovasi penggunaan pupuk organik yang dibuat secara mandiri dapat dilakukan untuk mengurangi kebutuhan petani serta membantu sistem pertanian organik (Budiyanto et al., 2018; Mulyati et al., 2020).

3.2 Proses distribusi alat pertanian

Realisasi perencanaan dalam pembangunan akan sulit memenuhi angka 100%, selalu muncul kemungkinan kurang atau lebih. Pada sektor pengelolaan pertanian, masalah tersebut juga tidak dapat dihindari oleh pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Data yang didapatkan dari e-RDKK menunjukkan berbagai kebutuhan yang sudah diajukan oleh petani, dan diharapkan mendapat jatah sesuai dengan ajuan tersebut. Masalah yang muncul selanjutnya adalah dengan terbatasnya akses dan pagu yang diberikan oleh penyedia pupuk, sehingga pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian perlu untuk membaginya dengan membuat prioritas.

Pupuk sebagai kebutuhan utama dalam kegiatan pertanian memiliki kendala setiap

musim tanam. Kebutuhan yang sudah direncanakan, tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh petani itu sendiri dengan mengandalkan pasokan dari pemerintah (Ashari et al., 2013). Penyediaan pupuk dapat dilakukan secara kerjasama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan mengandalkan kemampuan masing-masing dan mempertimbangkan kebutuhan (Hariyoko, 2013; Swasono & Munir, 2017). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulannya, perlu untuk mempertimbangkan subsidi pupuk, sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan. Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3. Berikut :

Tabel 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Kebutuhan Pupuk					
		Urea (ton)	SP36 (ton)	ZA (ton)	NPK (ton)	Org Granul (ton)	Org Cair (ton)
1	Sidoarjo	108,00	-	50,00	114,00	-	-
2	Buduran	262,00	8,00	85,00	168,00	-	-
3	Candi	496,00	2,00	168,00	284,00	-	-
4	Porong	325,00	3,00	108,00	174,00	1,00	1,00
5	Krembung	531,00	-	163,00	252,00	-	-
6	Tulangan	591,00	-	142,00	189,00	-	-
7	Tanggulangin	503,00	15,00	153,00	338,00	-	-
8	Jabon	746,00	39,00	292,00	443,00	27,00	52,00
9	Krian	407,00	-	126,00	278,00	-	-
10	Balombang	681,00	1,00	212,00	472,00	2,00	2,00
11	Wonoayu	500,00	17,00	146,00	343,00	-	-
12	Tarik	702,00	-	212,00	426,00	-	-
13	Prambon	552,00	-	156,00	346,00	-	-
14	Taman	158,00	2,00	72,00	157,00	-	-
15	Waru	17,00	-	8,00	17,00	-	-
16	Gedangan	156,00	2,00	71,00	152,00	-	-
17	Sedati	176,00	-	82,00	179,00	-	-
18	Sukodono	328,00	-	153,00	312,00	23,00	46,00
JUMLAH		7.239,00	89,00	2.399,00	4.680,00	53,00	101,00

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2021

Tabel 3. menjelaskan tentang alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Sidoarjo. Alokasi pupuk tersebut menunjukkan bahwa kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengajukan kebutuhan pupuk urea, ZA, dan NPK. Karena stok ketersediaan pupuk SP-36 dan

pupuk organik tidak bisa dipastikan ketersediaannya.

Dinas Pangan dan Pertanian memiliki peran lain sebagai penyedia barang langsung dan jasa yaitu mengadakan pelatihan petani untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Kelompok tani yang sudah menerima atau belum menerima bantuan alsintan biasanya diberikan pelatihan sesuai dengan buku panduan yang sudah ada. Dari gabungan kelompok petani tersebut dipilih hanya satu orang untuk dilatih sebagai operator, sedangkan untuk anggota kelompok lainnya bisa memperhatikan secara teknis bagaimana cara menjalankan alsintan tersebut, namun pelatihan juga bisa dilakukan secara manajemen yaitu dengan cara dibukukan. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut Dinas Pangan dan Pertanian mengundang narasumber untuk memberikan materi sedangkan kelompok tani yang datang bisa melakukan *sharing* permasalahan yang dihadapi. Untuk kegiatan pelatihan petani dapat dilihat pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Kegiatan Pelatihan Petani Tahun 2020-2021

No	Nama Kecamatan	Total Penelitian		
		2019	2020	2021
1	Tarik	3	2	2
2	Prambon	3	3	2
3	Balongbendo	2	3	2

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2021

Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo telah mengadakan pelatihan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Namun Dinas Pangan dan Pertanian berfokus pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon dan Kecamatan Balongbendo.

Untuk penyedia barang langsung dan jasa terkait alsintan Dinas Pangan dan Pertanian memiliki beberapa kriteria sesuai dengan buku panduan teknis untuk pemberian alsintan kepada para petani.. Kriteria yang digunakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian salah satunya yaitu diprioritaskan pada daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, mempertimbangkan kebutuhan alsin dan kondisi lokal spesifik yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alat dan mesin pertanian dan mempertimbangkan komitmen yang kuat dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian. Untuk alokasi dari berbagai kecamatan di Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Alokasi Alsintan Kecamatan Prambon, Tarik dan Balongbendo

No	Poktan/Gapoktan/UPJA	Kecamatan	Alsintan
1	Sri Sukarno II	Sidoarjo	Pompa Air
2	Bulkan	Balongbendo	Pompa Air

No	Poktan/Gapoktan/UPJA	Kecamatan	Alsintan
3	Ngudi Utomo	Balongsendo	Pompa Air
4	Jatiwates	Balongsendo	Pompa Air
5	Tunggal Jaya	Kremlung	Pompa Air
6	Tani Subur I	Jabon	Pompa Air
7	Tani Subur II	Jabon	Pompa Air
8	Rukun Tani I	Jabon	Pompa Air
9	Sumber Rejeki II	Wonoayu	Pompa Air
10	Sekar Jaya VI	Prambon	Pompa Air
11	Maju Makmur I	Prambon	Pompa Air
12	Sido Makmur II	Prambon	Pompa Air
13	Tani Utama	Tarik	Pompa Air
14	Kedungbocok Ari	Tarik	Pompa Air
15	Tani Segar	Balongsendo	<i>Rice Transplanter</i>
16	Maju Makmur IV	Prambon	Pompa Air

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2021

Data diatas menunjukkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten memberikan alsintan ke seluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo. Alsintan yang diterima di beberapa Kecamatan yang ada di Sidoarjo berupa pompa air dan rice *transplanter*.

Pembagian pupuk subsidi yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian juga merupakan salah satu perannya sebagai *Direct Provision of Goods and Services*. Dalam pelaksanaannya, pembagian pupuk bersubsidi di Kabupaten Sidoarjo mengalami permasalahan yaitu harga pupuk subsidi lebih mahal dari harga aslinya. Dengan harga tersebut para petani tidak mampu untuk membeli pupuk subsidi yang telah di sediakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu saja, saat ini pupuk bersubsidi yang disuplai oleh Dinas tidak lengkap seperti terdahulu. Sebelumnya pemberian pupuk bersubsidi terdapat 5 macam namun untuk saat ini hanya 2 macam yang diberikan kepada para petani. Selain itu, pembagian pupuk di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak merata, sebagai contoh yaitu Desa Penambangan selalu mendapatkan jatah pupuk yang lengkap. Sedangkan pengajuan pupuk di Desa Jenggot tidak mendapatkan jatah pupuk yang lengkap.

Pengajuan pupuk di Desa Jenggot selalu rutin dilaporkan melalui PPL Kecamatan Krembung. Selanjutnya PPL Kecamatan Krembung mengajukan pupuk melalui aplikasi RDKK. Namun untuk penerimaan pupuk bersubsidi di Desa Jenggot tidak selalu mendapatkan sesuai dengan yang diajukan sebab stok pupuk di Dinas saat ini mengalami kekurangan. Untuk tempat penyimpanan pupuk dapat dilihat pada gambar 2. berikut.



Gambar 2. Gudang Penyimpanan Pupuk di Desa Jenggot (Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2022)

Pada gambar 2. menjelaskan bahwa Desa Jenggot memiliki tempat khusus untuk penyimpanan pupuk yang diperoleh dari Dinas Pangan dan Pertanian. Di dalam tempat tersebut banyak alat-alat untuk keperluan pertanian misalnya alat mesin tanam, pupuk, racun tikus dan lainnya. Pada saat ini Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo belum bisa memenuhi permintaan pengajuan pupuk dari para gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Sidoarjo terutama pengajuan pupuk SP-36 dan pupuk organik karena menurut Dinas Pangan dan Pertanian stok kedua pupuk tersebut sulit ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan pupuk non bersubsidi untuk para petani. Tetapi, pupuk non subsidi tersebut dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah karena menurut gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Sidoarjo pupuk non bersubsidi harganya terlalu mahal sehingga gabungan kelompok tani merasa keberatan jika disuruh untuk membeli pupuk non subsidi tersebut.

Direct Provision of Goods and Services adalah peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik pure public goods secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. Semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Pemerintah berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, *public goods* dan *quasi public goods*, meskipun sudah diprivatisasi oleh swasta.

Dalam hal ini organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi

dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Dalam melaksanakan perannya sebagai *Direct Provision of Goods and Services* Dinas memiliki peran sebagai penyedia barang langsung dan jasa melalui program Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK). Program tersebut merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani di Kabupaten Sidoarjo.

Jones dalam Mahsun (2013:8-9) menyatakan bahwa sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Namun data di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut belum bisa berjalan dengan maksimal misalnya pengajuan pupuk yang diterima belum sesuai, pelatihan petani yang belum merata dan pemberian bantuan alsintan yang hanya diberikan ke beberapa kecamatan. Pelaksanaan regulasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar karena masih terdapat masalah pelaksanaan peran pemerintah dan sumber daya manusianya (Prayoga & Sutoyo, 2017). mengatasi hal tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan pupuk nonsubsidi melalui distributor sedangkan untuk pelatihan dan penyedia alsintan Dinas akan berupaya memaksimalkan pelatihan secara maksimal dan juga akan memberikan alsintan secara merata.

4. Simpulan

Direct Provision of Goods and Services adalah peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik *pure public goods* secara mudah bagi masyarakat. Dalam hal ini organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Dalam melaksanakan perannya sebagai *Direct Provision of Goods and Services* Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa program diantaranya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), pemberian alsintan, dan juga mengadakan pelatihan untuk para petani. Dinas Pangan dan Pertanian juga melakukan kerjasama dengan beberapa kios dan distributor untuk menyediakan pupuk non subsidi untuk para petani dengan cara seperti itu Dinas mengharapkan stok pupuk subsidi yang menipis bisa diatasi dengan membeli pupuk non subsidi di kios atau distributor yang sudah kerja sama dengan Dinas. Sedangkan untuk pembagian alsintan Dinas Pangan dan pertanian memiliki kriteria salah satunya yaitu diprioritaskan pada daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Untuk pembagian pupuk subsidi di Kabupaten Sidoarjo masih belum merata ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo..

5. Referensi

- Afifuddin, & Beni, S. A. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ashari, H., Sumarwan, U., & Kirbrandoko, K. (2013). Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Kualitas Layanan Perizinan Pupuk Di Kementerian Pertanian. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 10(3), 156–164. DOI: <https://doi.org/10.17358/jma.10.3.156-164>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan dalam penanganan dampak pandemi covid-19 pada usaha mikro di kabupaten gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 10. DOI: <https://doi.org/10.31334/reformasi.v8i1.1416.g733>
- Budiyanto, A., Juarsah, I., & Handayani, E. P. (2018). Peningkatan Kualitas Lahan Menggunakan Pupuk Organik Untuk Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Pertanian*, 16(2), 74–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37694/jwp.v14i2.31>
- Bukhori, M. (2014). *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia*. Surabaya.
- Hariyoko, Y. (2013). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 10 (2013).
- Kasmir. (2016). *Manajemen sumber daya manusia (teori dan paktik)*. Jakarta: PT
- Lorong, M. U., Sinu, I., & Nainiti, S. P. (2020) Peran Anggota Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produksi Padi Di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Buletin Ilmiah IMPAS*. DOI: <https://doi.org/10.35508/impas.v21i3.3317>
- Mahsun, M. (2009) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nahum, R. (2016). KAJIAN AKSESIBILITAS PERDESAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS NASIONAL PARALEL PERBATASAN YANG TEPAT SASARAN DAN TERINTEGRASI (STUDI KASUS DESA-DESA YANG DI LINTASI DI KECAMATAN KETUNGAU HULU). *Jurnal Teknik Sipil*, 16(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jtsft.v16i1.24799>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di kabupaten enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 14. DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Nurdin, & Hartati. (2019). *Metode penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Prayoga, A., & Sutoyo. (2017). Produktivitas Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Dampak Program Bantuan Alat Mesin Pertanian, Benih Dan Pupuk di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55259/jiip.v24i1.228>
- Sari, Nurma; Komalasari, Eka. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru. *JPAP:Journal of Public Administration*, 7(2), 12. DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.5572>

- Soetarto, S., Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi, *Jurnal Governance Opinion*. 4(2)
- Sugiyono (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Swasono, M. A. H., & Munir, M. (2017). Iptek Pengolahan Limbah Organik Menjadi Biokomposer Pada Kelompok Tani Padi Sri Sukorejo Pasuruan. *Jurnal Terapan Abdimas*, 2, 60–71. DOI: <http://doi.org/10.25273/jta.v2i0.977>
- Pertanian Sebagai Pupuk Organik Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(5), 850–858. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i5.3016>
- Pradnyana, I. N. U., Suardi, I. D. P. O., & Djelantik, A. A. . W. S. (2017). Realisasi Bantuan Alat Mesin Pertanian Kepada Subak (Kasus Pelaksanaan Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai di Subak Penginyahan Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar). *JURNAL AGRIBISNIS DAN AGROWISATA (JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND AGRITOURISM)*, 6(4), 470–476. DOI: <https://doi.org/10.24843/JAA.2017.v06.i04.p01>
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 271–283. DOI: <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.271>